

## Modul 1

### Topik: Orientasi Belajar



#### Tujuan

- 1 Peserta Saling mengenal, saling memahami dan menghargai perbedaan
- 2 Peserta mampu menciptakan keakraban
- 3 Peserta memahami tujuan, Apa yang akan diperoleh dan bagaimana pelatihan akan dilakukan
- 4 Membangun kesepakatan untuk melakukan pembelajaran bersama



#### Kegiatan Belajar

Kegiatan 1: Perkenalan

Kegiatan 2: orientasi Belajar



#### Waktu

1 JPL (45 Menit)



#### Acuan

Bahan Bacaan:

Kurikulum Pelatihan khusus Askot dan Fasilitator Ekonomi



#### Perlengkapan

- Kertas Plano, kuda-kuda untuk Flip-chart
- LCD
- Metaplan, spidol, selotip kertas dan jepitan besar
- Papan Tulis dengan perlengkapannya



## Proses



### Kegiatan

#### Perkenalan

Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai pelatihan ini dengan perkenalan peserta. Sebelum kegiatan ini dimulai, pemandu kelas harus sudah memilih cara perkenalan yang akan digunakan. Cara perkenalan yang dipilih sebaiknya menjadi proses awal membangun dinamika kelas. Jika menggunakan permainan sebagai cara untuk melakukan perkenalan, siapkan peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Seluruh peserta (pemandu kelas, wakil pemandu, panitia, dll) di dalam kelas ikut serta dalam permainan perkenalan ini.



### Kegiatan

#### Penjelasan Kurikulum Pelatihan/GBPP

- 1) Mintalah setiap peserta untuk menuliskan dalam kartu mepatapkan harapan yang ingin dicapai melalui pelatihan ini.
- 2) Kelompokkan harapan tersebut dalam kelompok besar, misalnya kelompok menambah pemahaman, menambah pengalaman, menambah jaringan persaudaraan, dan lainnya
- 3) Jelaskan Garis Besar Program Pembelajaran dan gunakan Kurikulum pelatihan khusus RT dan RW
- 4) Buka kesempatan tanya jawab untuk kegiatan ini
- 5) Jelaskan kepada peserta bahwa kita punya harapan bersama yang dirumuskan pada awal kegiatan. Diperlukan kesepakatan bersama untuk mencapai harapan tersebut selama pelatihan ini. Kesepakatan bersama tersebut merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan merupakan aturan main bersama termasuk tata tertib agar dapat tercapai harapan bersama, yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan.
- 6) Diskusikan dengan peserta hal-hal apa saja yang harus disepakati untuk diatur bersama untuk menjaga proses pelatihan tersebut.

7) Tuliskan semua hal yang disepakati dan tata tertib yang telah disepakati tersebut pada kertas plano dan tempelkan di dinding di tempat semua peserta dapat melihat. Bangun kesepakatan bahwa aturan main dan tata tertib tersebut bersifat mengikat semua pihak di kelas tersebut selama pelatihan.

8) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

### **Pelatihan RT dan RW**

#### **Kapasitas yang harus dimiliki :**

- Pengetahuan dan konsep dasar, filosofi, pendekatan PNPM
- Pemahaman terhadap konsep kemiskinan dan penanggulangannya
- Pemahaman terhadap Siklus tahunan masyarakat
- Pemahaman terhadap peran dan fungsi RT dan RW
- Pemahaman terhadap BKM
- Pemahaman terhadap progres capaian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

#### **Tujuan Umum Pelatihan :**

- Memahami terhadap Gambaran Penurunan Kemiskinan Kota dan Kemiskinan Kelurahan
- Memahami terhadap peran dan fungsi BKM/LKM
- Memperkenalkan Konsep dasar PNPM dan siklus PNPM Mandiri Perkotaan
- Perkenalan konsep dan penerapan kelembagaan komunitas, CDD dan pemberdayaan masyarakat
- Memperkenalkan fungsi dan peran pelaku termasuk peran RT dan RW dalam program dan pembangunan

Tujuan	Tema	Topik	Durasi
• Memahami Gambaran Penurunan Kemiskinan Kota dan Kelurahan	Penurunan Kemiskinan Kota dan Kelurahan	Potret Kemiskinan Kota dan Kelurahan	2
• Memahami Perkembangan PNPM Mandiri Perkotaan dan Kemiskinan	PNPM Mandiri Perkotaan dan Kemiskinan Kelurahan	Gambaran Perkembangan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan	3
• Dapat memahami peran dan fungsi BKM/LKM dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan	BKM/LKM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan	Gambaran tentang Lembaga BKM/LKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2
○ Peserta dapat memahami dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	RT dan RW dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan	RT dan RW sebagai mitra BKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	3
• Mampu menyusun rencana bersama untuk	Rencana Tindak Lanjut	Rencana bersama dalam rangka peningkatan	3

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan		kesejahteraan masyarakat	
<b>Total</b>			<b>13 JPL</b>

## Modul 2

### Topik: Potret Kemiskinan Kota dan Kelurahan



#### Tujuan

Peserta memahami gambaran penurunan kemiskinan kota dan kelurahan



#### Kegiatan Belajar

Diskusi gambaran penurunan kemiskinan kota dan kelurahan



#### Waktu

2 JPL (90')



#### Acuan

Bahan Bacaan :

1. Data BPS Kota tentang :
  - a. Indikator kemiskinan
  - b. Jumlah dan persentase penduduk miskin (tahun 2010, 2011 dan 2012)
2. Data penerima raskin per kelurahan (tahun 2010, 2011 dan 2012)
3. Data PS 2 pada PJM Pronangkis (tahun 2010, 2011 dan 2012)
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan



#### Perlengkapan

1. Kertas Plano
2. Kuda-kuda untuk Flip-chart
3. LCD
4. Metaplan
5. Papan Tulis dengan perlengkapannya

## 6. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar

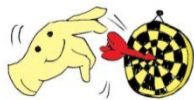


### Proses

1. Jelaskan bahwa kita akan membahas modul Potret Kemiskinan Kota dan Kelurahan dan tujuan modul ini peserta memahami gambaran penurunan kemiskinan kota dan kelurahan.
2. Menyampaikan perkembangan persentase penduduk miskin tingkat kota tahun 2010 sampai 2012.
3. Menjelaskan persentase kemiskinan menurut BPS diukur berdasarkan 14 kriteria miskin menurut standar BPS.
4. Pemandu mengajak peserta untuk berdiskusi :
  - a. Tingkat kemiskinan meningkat atau menurun ?
  - b. Hal-hal apa yang mempengaruhi perubahan persentase penduduk miskin ?
5. Bandingkan perkembangan persentase kemiskinan tingkat kota dengan perkembangan persentase kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan jumlah penerima raskin.
6. Bandingkan perkembangan persentase kemiskinan tingkat kota dengan perkembangan persentase kemiskinan di tingkat kelurahan berdasarkan jumlah PS 2.
7. Apakah tren perkembangan kemiskinan tingkat kota sama dengan tingkat kelurahan ?
8. Jelaskan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perkembangan persentase penduduk miskin tingkat kota dan tingkat kelurahan.
9. Akhiri pertemuan dengan menyampaikan kesimpulan umum mengenai potret kemiskinan kota dan kelurahan.

## Modul 3

**Topik:** Gambaran PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan



### Tujuan

Peserta memahami perkembangan PNPM Mandiri Perkotaan dan Kemiskinan di kelurahan



### Kegiatan Belajar

1. Warungan / Komedi Putar (Bazar Informasi)
2. Diskusi



### Waktu

3 JPL (135')



### Acuan

1. Dokumentasi Kegiatan BKM dan produk KSM
2. Hasil PS-2
3. Dokumen PJM Pronangkis dan Renta
4. Dokumen pembukuan sekretariat dan UPK
5. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
6. Media (modul-modul) pelatihan tahun 2012
7. Hasil audit independen tahun buku 2011
8. Realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 2007 sampai 2012
9. Gambaran siklus PNPM Mandiri Perkotaan



### Perlengkapan

- Kertas Plano

- Kuda-kuda untuk Flip-chart
- LCD
- Metaplan
- Papan Tulis dengan perlengkapannya
- Spidol, selotip kertas dan jepitan besar



## Proses

1. Jelaskan bahwa kita akan membahas modul Gambaran PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan dan tujuan modul ini peserta memahami perkembangan PNPM Mandiri Perkotaan dan Kemiskinan di kelurahan.
2. Jelaskan secara umum siklus dasar PNPM Mandiri Perkotaan.
3. Bagi peserta dalam 3 (tiga kelompok) masing-masing kelompok berjumlah 10 (sepuluh) peserta.



4. Kelompokkan media penunjang dalam 3 (tiga) kelompok :

**Kelompok 1 :**

Dokumen PJM Pronangkis dan Renta

PS 2

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Media (modul-modul) pelatihan tahun 2012

**Kelompok 2 :**

Dokumen pembukuan sekretariat dan UPK

Hasil audit independen tahun buku 2011

**Kelompok 3 :**

Dokumentasi Kegiatan BKM dan produk KSM

Realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 2007 sampai 2012

5. Setiap kelompok didampingi oleh relawan atau pelaku lama yang akan menjelaskan tentang dokumen yang ada dalam kelompoknya.
6. Peserta memantau dokumen dalam setiap kelompok secara bergilir atau berputar, dengan waktu pemantauan setiap kelompok selama 10 menit.
7. Kelompok peserta mencatat hasil pengamatan dalam setiap kelompok.
8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil pengamatan.
9. Diskusi tentang hasil pengamatan.
10. Pemandu memberikan pencerahan tentang :
- Output pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah dihasilkannya dokumen perencanaan berupa PJM Pronangkis dan daftar jiwa miskin (data PS-2).
  - Realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan karena tercatat dalam administrasi pembukuan dan diaudit oleh audit independen dan didukung oleh dokumentasi kegiatan.
  - Seluruh fasilitasi kegiatan didasarkan pada pedoman dan modul.



## Media Bantu



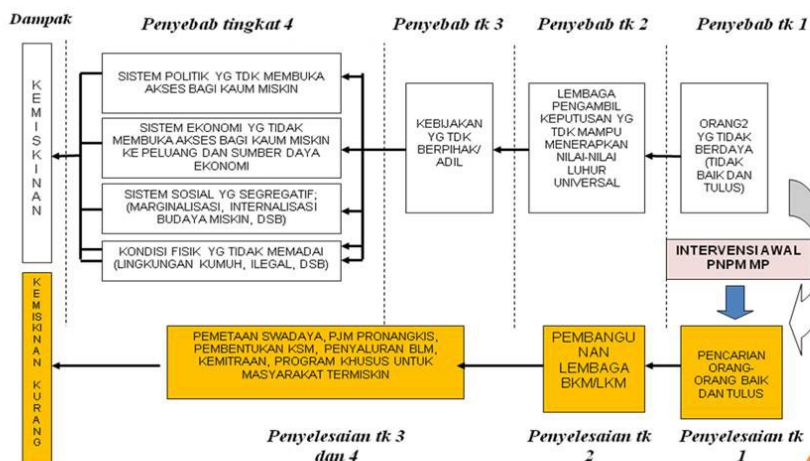
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



## GAMBARAN UMUM SIKLUS

PNPM Mandiri Perkotaan

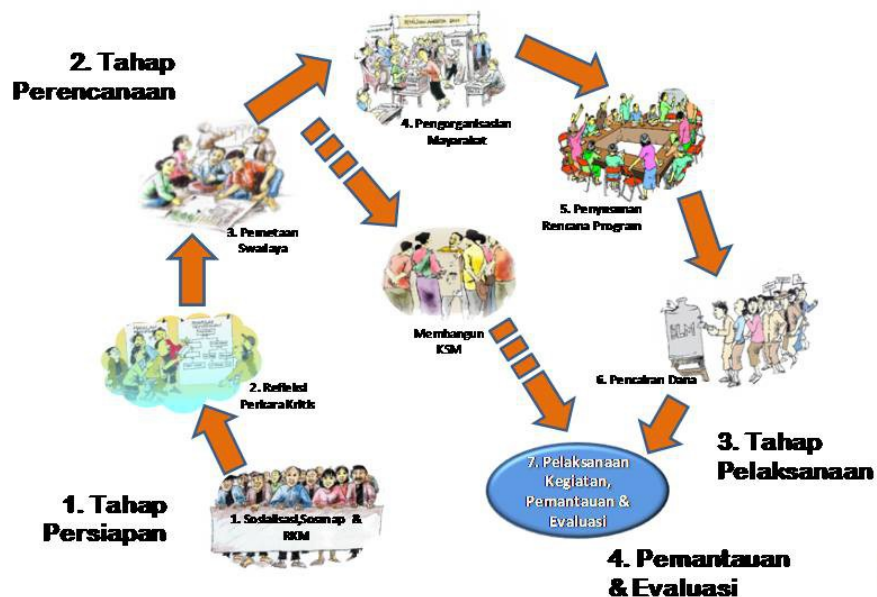
### PENANGANAN AKAR KEMISKINAN OLEH MASYARAKAT MELALUI PNPM MP



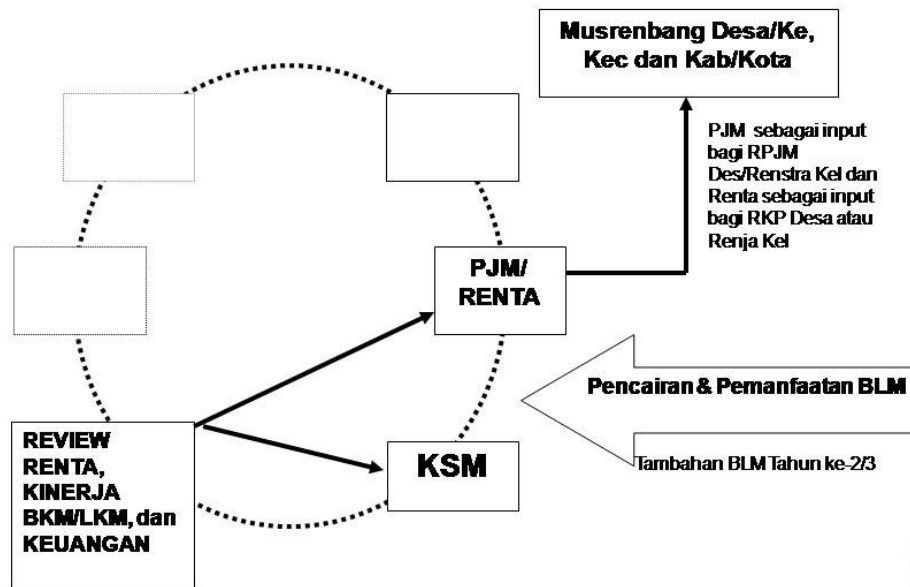
## STRATEGI TRASFORMASI SOSIAL MASYARAKAT PNPM MP



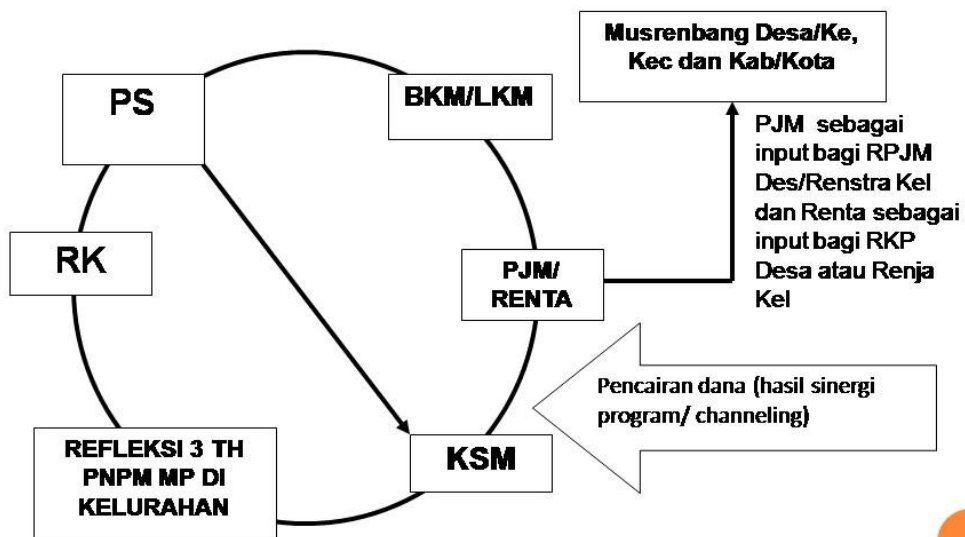
## SIKLUS MASYARAKAT



## SIKLUS LANJUTAN TAHUN 2 /3



## SIKLUS LANJUTAN TAHUN KE-4



## SUBSTANSI SIKLUS MASYARAKAT

No	Tahapan Siklus	Tujuan	
		Siklus Masyarakat tingkat Dasar	Siklus Masyarakat tingkat Lanjutan
TAHAP PERSIAPAN			
1	Sosialisasi & Pemetaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat</li><li>• Penyebarluasan informasi ttg akan adanya program PNPM MP di kel/desa tersebut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat</li><li>• Penyebarluasan informasi ttg akan adanya program tambahan/khusus</li></ul>
2	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun komitmen masyarakat untuk menerima/menolak PNPM MP dgn segala konsekwensinya</li><li>• Menggalang relawan yang sesuai kriteria</li><li>• Menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi &amp; mengawal PNPM MP (nilai-nilai)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembaharuan komitmen masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan</li><li>• Menggalang relawan-relawan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan minat</li><li>• Menghasilkan relawan khusus yang mampu memfasilitasi</li></ul>

No	Tahapan Siklus	Tujuan	
		Siklus Masyarakat tingkat Dasar	Siklus Masyarakat tingkat Lanjutan
TAHAP PERENCANAAN			
3	Refleksi Perkara Kritis (misalnya refleksi kemiskinan /RK, refleksi bencana, refleksi kemiskinan dan gender, refleksi kawasan padat dan miskin, dsb)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi Refleksi Kemiskinan</li><li>• Menumbuhkan kesadaran bahwa ada masalah bersama, yaitu kemiskinan yg hrs ditanggulangi bersama</li><li>• Menemukan akar penyebab kemiskinan</li><li>• Membangun niat bersama utk menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi berbagai proses FGD seperti refleksi bencana, refleksi kemiskinan &amp; perempuan, dll</li><li>• Menumbuhkan kesadaran bahwa ada masalah bersama, yaitu kemiskinan dan pembangunan yg hrs ditanggulangi bersama</li><li>• Menemukan akar penyebab kemiskinan, kesenjangan gender, persoalan bencana, dll</li><li>• Membangun niat bersama utk menanggulangi berbagai permasalahan kemiskinan secara terorganisasi</li></ul>

No	Tahapan Siklus	Tujuan	
		Siklus Masyarakat tingkat Dasar	Siklus Masyarakat tingkat Lanjutan
TAHAP PERENCANAAN			
4	Pemetaan Swadaya (PS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan yg mampu menganalisis masalah dan potensi masyarakat</li><li>• Membangun kesadaran akan realita persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) masyarakat kelurahan/desa</li><li>• Membangun motivasi untuk berbuat/menyelesaikan persoalan</li><li>• Menghasilkan data-data dan informasi lingkungan (tabel &amp; peta-peta tematik)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan mampu memfasilitasi dan melaksanakan Pemetaan Swadaya lanjutan khususnya potensi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan.</li><li>• Membangun kesadaran akan realita persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) masyarakat kelurahan/desa</li><li>• Membangun motivasi untuk berbuat/menyelesaikan persoalan</li><li>• Menghasilkan pemutakhiran data dan prioritas pembangunan</li></ul>

No	Tahapan Siklus	Tujuan	
		Siklus Masyarakat tingkat Dasar	Siklus Masyarakat tingkat Lanjutan
	TAHAP PERENCANAAN		
5	Pengorganisasian Masyarakat (BKMKLM)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan kriteria kepemimpinan moral</li><li>• Tata cara menemukan orang-orang baik dan tulus</li><li>• Terbentuknya lembaga kepemimpinan yang representatif dan mengakar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan lembaga masyarakat yang berkinerja baik kreatif dan inovatif.</li><li>• Menghasilkan unit-unit pelaksana yang handal sesuai kebutuhan</li></ul>
6	Penyusunan Rencana Program (Jangka Menengah & Rencana Tahunan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan/BKMKLM yang mampu melaksanakan penyusunan rencana program</li><li>• Tersusunnya program pembangunan kelurahan jangka menengah yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan/BKMKLM yang mampu melaksanakan penyusunan rencana program yang lebih komprehensif</li><li>• Tersusunnya program pembangunan kelurahan jangka menengah yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan penataan lingkungan pemukiman yang lebih baik</li></ul>



No	Tahapan Siklus	Tujuan	
		Siklus Masyarakat tingkat Dasar	Siklus Masyarakat tingkat Lanjutan
	TAHAP PERENCANAAN		
7	Pemasaran Program	<ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya pemasaran sosial tentang rencana program kepada seluruh pihak (masyarakat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Terlembaganya pemasaran sosial tentang rencana program kepada seluruh pihak (masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan)</li></ul>

No	Tahapan Siklus	Tujuan	
		Siklus Masyarakat tingkat Dasar	Siklus Masyarakat tingkat Lanjutan
	TAHAP PELAKSANAAN		
8	Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan melaksanakan pengorganisasian KSM</li><li>• Terbentuknya KSM sebagai satuan unit sosial yang saling tolong dalam mengembangkan diri masing-masing anggotanya</li><li>• Terbentuknya KSM ekonomi yang sudah memiliki kegiatan bersama</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghasilkan relawan melaksanakan pengorganisasian KSM</li><li>• KSM sebagai satuan unit sosial yang yang berorientas pada penanggulangan kemiskinan dan penataan lingkungan permukiman yang lebih baik</li><li>• KSM ekonomi yang sudah memiliki kegiatan bersama dan kerjasama dengan berbagai pihak</li></ul>
9	Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerima manfaat adalah warga miskin yang dalam data Pemetaan Swadaya , yang terinci dalam lembar PS 2 terkini yang telah disepakati warga.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerima manfaat adalah warga miskin yang dalam data Pemetaan Swadaya , yang terinci dalam lembar PS 2 terkini yang telah disepakati warga.</li></ul>

No	Tahapan Siklus	Tujuan	
		Siklus Masyarakat tingkat Dasar	Siklus Masyarakat tingkat Lanjutan
TAHAP PEMANTAUAN DAN EVALUASI			
10	Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya keterbukaan dan tanggung gugat.</li><li>• Terbangunnya kepedulian masyarakat untuk memantau kemajuan program secara berkala dan mandiri.</li><li>• Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan.</li><li>• Terbangunnya pengendalian sosial.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melembaganya keterbukaan dan tanggung gugat.</li><li>• Melembaganya proses pemantauan dan partisipasi masyarakat.</li><li>• Melembaganya pengendalian sosial.</li></ul>
11	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diketauhinya kualitas proses dan hasil program per tahap evaluasi.</li><li>• Diketauhinya kesesuaian dengan pedoman, peraturan dan nilai-nilai setempat.</li><li>• Diketauhinya kesesuaian dengan tujuan program.</li><li>• Dilakukannya tindak lanjut hasil evaluasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diketauhinya kualitas proses dan hasil program per tahap evaluasi.</li><li>• Diketauhinya kesesuaian dengan pedoman, peraturan dan nilai-nilai setempat.</li><li>• Diketauhinya kesesuaian dengan tujuan program.</li><li>• Dilakukannya tindak lanjut hasil evaluasi.</li></ul>



## Modul 4

**Topik:** BKM/LKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan



### Tujuan

Peserta memahami peran dan fungsi BKM/LKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan



### Kegiatan Belajar

Kegiatan 1: Ceramah / Paparan

Kegiatan 2: Diskusi Kelompok



### Waktu

2 JPL (90')



### Acuan

1. Dokumentasi Kegiatan BKM dan produk KSM
2. Realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 2007 sampai 2012
3. Bahan bacaan struktur dan tupoksi BKM/LKM



### Perlengkapan

- Kertas Plano
- Kuda-kuda untuk Flip-chart
- LCD
- Metaplan
- Papan Tulis dengan perlengkapannya
- Spidol, selotip kertas dan jepitan besar



## Proses



## Kegiatan

### Ceramah / Paparan

1. Jelaskan bahwa kita akan membahas modul BKM/LKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan dan tujuan modul ini Peserta memahami peran dan fungsi BKM/LKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Pemandu menjelaskan struktur serta tugas pokok dan fungsi BKM/LKM.
3. Pemandu memberikan kesempatan kepada BKM/LKM untuk menyampaikan capaian kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan sejak 2007 sampai saat ini (termasuk kemitraan, tidak semata melalui PNPM Mandiri Perkotaan).
4. Tanya jawab peserta dipandu oleh pemandu.

BKM/LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota – anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga.

Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat, dan transparansi. Di samping itu pola kepemimpinan kolektif juga merupakan desinsentif bagi para pemimpin yang justru ingin mendapatkan kekuatan absolut di satu tangan yang pada gilirannya akan melahirkan tirani dan anarki yang mementingkan diri sendiri dan ketidakadilan.

Masyarakat warga adalah terjemahan dari civil society, yaitu himpunan masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar.

Dengan demikian BKM/LKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat.



## Kegiatan

### Diskusi Kelompok Misi, Fungsi, Tugas BKM/LKM

1) Bahas bersama peserta , berdasarkan hasil diskusi dalam kegiatan 1 . :

- Apakah misi BKM/LKM ?
- Apakah fungsi BKM/LKM ?

BKM/LKM sebagai kepemimpinan kolektif dari masyarakat warga, harus menggerakkan perubahan masyarakat, BKM harus membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk menjadi masyarakat yang saling percaya di antara mereka, dan bisa dipercaya pihak luar karena kepercayaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam membangun kebersamaan.

Kepercayaan bisa tumbuh dan terbangun apabila dilandasi oleh kejujuran , keterbukaan, saling mengerti, saling menghargai, tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Masyarakat yang berhubungan atau membangun ikatan sosial seperti di atas, akan menjadi kuat dan mandiri khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Karena tingkat kemandirian yang paling tinggi apabila ada saling ketergantungan di antara berbagai pihak , dimana hubungan sosial antar berbagai pihak dilandasi oleh kesetaraan (keadilan).

Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai komunitas disebut modal sosial. Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun kelompok masyarakat yang besar seperti negara.

Oleh karena itu modal sosial yang harus ditumbuhkan oleh BKM/LKM adalah :

- Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM
- Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan masyarakat
- Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat
- Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM, masyarakat dan pihak luar.

- 2) Bagi peserta ke dalam 3 kelompok, beri tugas kelompok untuk mendiskusikan :

**Kelompok 1** : apa yang harus dilakukan oleh BKM/LKM, agar tumbuh kerjasama dan kepercayaan dengan RT dan RW ?

**Kelompok 2** : apa yang harus dilakukan oleh BKM/LKM agar tumbuh kerjasama dan kepercayaan antara BKM dengan masyarakat ?

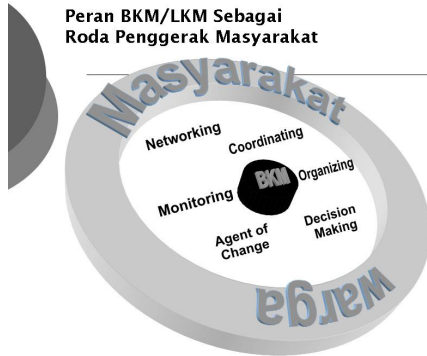
**Kelompok 3** : apa yang harus dilakukan oleh BKM/LKM agar tumbuh kerjasama dan kepercayaan dengan lembaga – lembaga yang ada di masyarakat

- 3) Lanjutkan hasil diskusi kelompok dalam pleno kelas, beri kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.
- 4) Berikan pencerahan dengan menggunakan Media Bantu yang sudah disediakan.



**Media Bantu**

### Peran BKM/LKM Sebagai Roda Penggerak Masyarakat



Slide 1

### Mengapa BKM/LKM Diperlukan ?

Dominasi dari pihak luar terhadap masyarakat, melemahkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan

Dominasi menyebabkan perpecahan masyarakat ke dalam golongan-golongan dengan berbagai kepentingan, sehingga menyebabkan lunturnya kepedulian, ketulusan manusia untuk berbuat baik bagi sesama

Solidaritas sosial luntur, dan makin memiskinkan orang miskin

Kemiskinan merupakan persolan bersama, harus ditanggulangi bersama.

Diperlukan wadah perjuangan untuk penanggulangan kemiskinan dan kepemimpinan kolektif yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan agar mampu mengendalikan gerakan bersama.

Slide 2

### Pengertian BKM/LKM

- BKM/LKM adalah nama "Generic"; Masyarakat boleh membentuk baru atau lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sesuai dengan prinsip dan nilai yang diusung melalui PNPM Mandiri Perkotaan. (*Dipercaya warga*)
- BKM/LKM merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan
- Keputusan dalam lembaga dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM/LKM, dimana musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan

Slide 3

### Misi BKM/LKM

Membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang pada gilirannya diharapkan memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani

Slide 4

### BKM/LKM & Sebagai Persemaian Kapital Sosial Demokrasi












Slide 5

### Modal Sosial

- Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi
- Kemampuan muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian bagian paling kecil dalam masyarakat.

Slide 6

 <h3>Modal Sosial BKM/LKM</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dan kepercayaan di antara anggota</li> <li>2. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan masyarakat</li> <li>3. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat</li> <li>4. Menumbuhkan kerjasama antara BKM/LKM dengan pihak luar (Kemitraan)</li> </ol>	 <h3>Modal Sosial BKM/LKM</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dan kepercayaan di antara anggota <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merumuskan semua keputusan bersama, meminimalkan kepentingan individu</li> <li>✓ Menjalin dialog terbuka, saling memberikan informasi, saling menghargai antar anggota.</li> <li>✓ Informasi disajikan secara transparan termasuk menyangkut keuangan agar semua anggota dapat kesempatan mengakses</li> </ul> </li> </ol>
<p>Slide 7</p>	<p>Slide 8</p>
 <h3>2. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan Masyarakat</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menjalankan tugas dengan jujur dan adil, prioritas berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat</li> <li>✓ Tidak mencari keuntungan pribadi</li> <li>✓ Tidak memihak kepada kelompok tertentu, memberi kesempatan kepada semua warga untuk terlibat</li> <li>✓ Memberikan informasi kegiatan BKM/LKM, transparansi keuangan dan informasi lain melalui papan info dan media lainnya</li> <li>✓ Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dan kegiatan lain (akuntabilitas), melalui rapat tahunan dan rapat istimewa apabila diperlukan</li> </ul>	 <h3>3. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menumbuhkan kepedulian warga, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program (perumusan masalah, perencanaan, pelaksanaan dan money)</li> <li>✓ Menggalang kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok (KSM)</li> </ul>
<p>Slide 9</p>	<p>Slide 10</p>
 <h3>4. Menumbuhkan kerjasama antara BKM/LKM dengan pihak luar (Kemitraan)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketiga kerjasama tersebut merupakan modal untuk dapat dipercaya pihak luar. Merupakan keniscayaan bagi BKM/LKM untuk bisa bermitra baik dalam bentuk program maupun menggalang sumber dana.</li> </ul>	 <h3>Fungsi Utama BKM/LKM</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan</li> <li>o Tempat pengembangan aturan dan kode etik dalam urusan penanggulangan kemiskinan</li> <li>o Pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan demokratis dalam nangkis</li> <li>o Mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat</li> <li>o Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kelurahan</li> <li>o Advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat</li> </ul>
<p>Slide 11</p>	<p>Slide 12</p>

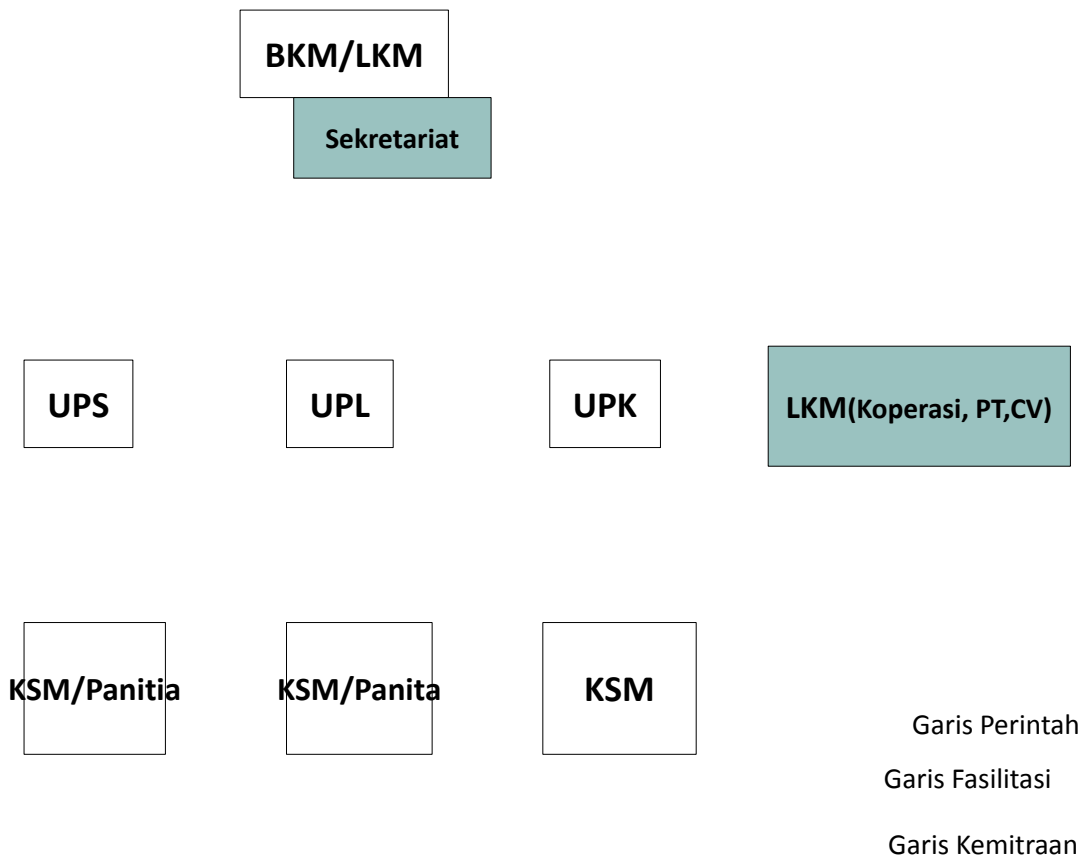
 <h3>Tugas Pokok BKM/LKM</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan</li> <li>o Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan Pronangkis</li> <li>o Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil</li> <li>o Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan monitoring evaluasi</li> </ul>	 <h3>Tugas Pokok BKM/LKM</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Memonitor, memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal</li> <li>o Membangun transparansi dan akuntabilitas</li> <li>o Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP UP, termasuk penggunaan keuangan</li> <li>o Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kabupaten</li> </ul>
<p>Slide 13</p>	<p>Slide 14</p>
 <h2>Terima Kasih</h2>	
<p>Slide 15</p>	



## Media Bantu

Tuliskan dalam kertas plano hal – hal di bawah ini sebelum pelatihan dimulai sebagai Media Bantu untuk menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada peserta

### Perangkat Organisasi BKM/LKM



### Unit Pengelola Keuangan (UPK)

- ◆ Dipimpin oleh seorang manajer yang dipilih melalui rapat anggota BKM/LKM
- ◆ Anggota sesuai kebutuhan
- ◆ Tidak diperbolehkan dirangkap oleh BKM/LKM
- ◆ Pengawasan pelaksanaan UP oleh BKM/LKM
- ◆ Pelayanan UP berorientasi pada masyarakat miskin
- ◆ Apabila diperlukan BKM/LKM bisa mengangkat dewan pengawas keuangan untuk membantu menjalankan tugas BKM/LKM yang sifatnya tidak permanen



### Unit Pengelola (UP)

- ◆ Masing – masing Unit Pengelola berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana
- ◆ Bertanggung jawab kepada BKM/LKM
- ◆ Berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan masing – masing kegiatan
- ◆ Memberikan pertanggung jawaban berkala dan pertanggung jawaban akhir
- ◆ Memberi masukan bagi pertimbangan keputusan BKM/LKM

### Sekretariat

- ◆ Pelaksana operasional dan administrasi kegiatan sehari – hari
- ◆ Maksimum 3 orang, bekerja penuh waktu
- ◆ Tidak diperkenankan dirangkap oleh BKM/LKM atau UP

***Hubungan kerja antara BKM/LKM dan UP – UP diatur di dalam AD/ART BKM/LKM kelurahan bersangkutan dan secara rinci dalam keputusan – keputusan yang dikeluarkan BKM/LKM***

### Mekanisme Pengambilan Keputusan

#### 1. Rembug Warga Kelurahan/Desa (RWK/RWD)

- ◆ Dilakukan di tingkat kelurahan/Desa
- ◆ Sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan tanggung gugat BKM/LKM kepada seluruh warga
- ◆ Mekanisme pergantian anggota BKM/LKM apabila masa jabatannya berakhir
- ◆ Mekanisme apabila ada indikasi penyimpangan
- ◆ Keputusan RWK/RWD sifatnya mengikat
- ◆ Mengundang segenap lapisan masyarakat dan perangkat kelurahan
- ◆ Mekanisme diatur dalam AD BKM/LKM

#### 2. Rapat Anggota BKM/LKM

##### *Rapat Anggota Tahunan (RAT)*

- ◆ Dilakukan setiap tahun
- ◆ Sebagai evaluasi dan penilaian kinerja UP
- ◆ Terbuka untuk semua masyarakat
- ◆ Mekanisme diatur dalam AD/ART BKM/LKM

##### *Rapat Koordinasi Anggota Rutin (RKA)*

- ◆ Dilakukan sekurangnya satu kali dalam sebulan
- ◆ Membahas perkembangan program dan kegiatan
- ◆ Menetapkan rencana kegiatan lanjutan dari BKM/LKM dan UP

##### *Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK)*

- ◆ Untuk menetapkan prioritas (perangkingan) usulan – usulan kegiatan hasil penilaian UP

##### *Rapat Keputusan Khusus (RKK)*

- ◆ Dilakukan sesuai kebutuhan

- ◆ Pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kegiatan BKM/LKM dan penanggulangan kemiskinan

### **Pengelolaan Keuangan BKM/LKM**

#### **1. Penyaluran Dana Bantuan**

- ◆ BKM/LKM akan mengelola dana bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan
- ◆ Dana ini adalah dana publik
- ◆ Hanya dapat digunakan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan
- ◆ Disalurkan melalui KSM atau Panitia
- ◆ Dana disalurkan melalui rekening BKM/LKM (berbentuk Giro) atas nama BKM/LKM, bukan perorangan
- ◆ Spesimen rekening Bank ditandatangani oleh minimal 3 orang anggota BKM/LKM
- ◆ Nama – nama penandatangan spesimen diputuskan melalui rapat anggota

#### **2. Sumber Dana Lain**

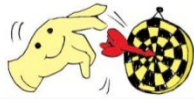
Selain dari dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan, keuangan BKM/LKM dapat pula bersumber dari uang iuran, uang sumbangan, hibah dan atau penerimaan lain yang sah, dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan BKM/LKM.

#### **3. Biaya Operasional**

- ◆ sumber keuangan diperoleh dari biaya administrasi dan operasional alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan
- ◆ Besarnya : 1) RP 5 juta untuk pagu BLM 150 juta 2) RP 7,5 juta untuk pagu BLM 200 jt 3) Rp 10 juta untuk pagu BLM 350 jt
- ◆ Pencairan dilakukan bertahap (dihitung dari seluruh kegiatan yang telah disetujui BKM/LKM)
- ◆ Sumber lain : dibiayai dari keuntungan hasil usaha unit – unit pengelola yang besarnya harus disepakati dalam rapat anggota BKM/LKM dan kemampuan keuangan yang ada

## Modul 5

**Topik:** RT dan RW sebagai mitra BKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan



### Tujuan

Peserta dapat memahami dan mampu melaksanakan peran dan fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat



### Kegiatan Belajar

Diskusi kelompok



### Waktu

3 JPL (135')



### Acuan

Perda atau aturan tentang tupoksi RT / RW



### Perlengkapan

- Kertas Plano
- Kuda-kuda untuk Flip-chart
- LCD
- Metaplan
- Papan Tulis dengan perlengkapannya
- Spidol, selotip kertas dan jepitan besar



## Proses

1. Jelaskan bahwa kita akan membahas modul RT dan RW sebagai mitra BKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan dan tujuan modul ini peserta dapat memahami dan mampu melaksanakan peran dan fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemandu mengajak peserta untuk diskusi mengenai pengalaman – pengalamannya terlibat dalam kegiatan – kegiatan penanggulangan kemiskinan selama ini.
3. Pemandu mengajak peserta untuk diskusi kelompok membahas mengenai:
  - a. Apa yang harus dilakukan RT dan RW sebagai agen Sosialisasi
  - b. Apa yang harus dilakukan RT dan RW sebagai motor penggerak untuk mengajak pada masyarakat dalam berpartisipasi
  - c. Apa yang harus dilakukan RT dan RW sebagai kontroler terhadap 1) program, 2) BKM, dan 3) KSM / Penerima manfaat
4. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi.
5. Jelaskan kepada peserta beberapa tata peran pelaku yang ada dalam struktur organisasi RT/RW.
6. Jelaskan kepada peserta, bahwa RT dan RW merupakan bagian dari Pemerintah Desa / Kelurahan (sampaikan juga aturan yang menaungi keberadaan RT dan RW) sehingga secara fungsional harus mempunyai peran-peran diatas, lakukan diskusi dengan peserta mengenai pola relasi antara peserta dengan pelaku lainnya (BKM/LKM dan pemerintah kelurahan) dalam menjalankan perannya. Untuk lebih memudahkan dapat menggunakan tabel berikut ini :

Pola Relasi	BKM/LKM	Kelurahan
RT/RW		

7. Mintalah peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
8. Rumuskan bersama peran dan fungsi RT/RW dalam bermitra dengan BKM/LKM untuk penanggulangan kemiskinan.

**Makalah: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT DESA DI  
INDONESIA**

**Posted by Septinia Eka Silviana**

.....Ketua RT dan RW

**RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah. RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu:**

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya**
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga**
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat**
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi rakyat masyarakat di wilayah lainnya.  
Jadi, hak, wewenang, dan kewajiban dari perangkat desa sudah dibagi sedemikian rupa sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing agar pelaksanaan tatanan administrasi di tingkat desa berjalan dengan baik, tertata, dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku**
- e. ....**

## Modul 6

**Topik:** Rencana bersama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat



### Tujuan

Peserta mampu menyusun rencana bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.



### Kegiatan Belajar

Diskusi kelompok



### Waktu

3 JPL (135 ` )



### Acuan

1. Rencana kerja BKM/LKM tahun 2013
2. RPJM Desa / Renstra Kecamatan / RKP 2013



### Perlengkapan

- Kertas plano
- Kuda-kuda untuk flip chart
- Papan tulis dengan perlengkapannya
- Spidol, selotip kertas dan jepitan besar



## Proses

1. Jelaskan bahwa kita akan membahas modul rencana bersama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tujuan modul ini peserta mampu menyusun rencana bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.
2. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok berdasarkan domisili masing-masing wilayah membahas rencana kerja RT RW :

No.	Program Kerja	Waktu

3. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi.
4. Pemandu memberikan kesempatan kepada BKM/LKM untuk menyampaikan program kerja dan rentatahun 2013.
5. Rumuskan RKTL bersama antara RT RW dengan BKM/LKM.